**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

**TAHUN 2017**

**BIRO ORGANISASI**

**SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DAFTAR ISI**

1. Pendahuluan
2. Latar Belakang
3. Dasar Hukum
4. Maksud dan Tujuan
5. Ruang Lingkup
6. Sekilas Tentang SPIP
7. Pengertian
8. Tujuan SPIP
9. Unsur-unsur SPIP
10. Lingkungan Pengendalian
11. Penilaian Resiko
12. Aktivitas Pengendalian
13. Informasi dan Komunikasi
14. Pemantauan Berkelanjutan
15. Pernyataan Tanggung Jawab *(Statement of Responsibilities)*
16. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan
17. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalianj Yang baik
18. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini
19. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
20. Risiko dan Kegiatan Pengendalian
21. Pernyataan Tujuan
22. Risiko-risiko
23. Pengendalian Terpasang
24. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan
25. Informasi dan Komunikasi
26. Pemantauan dan Evaluasi
27. Penutup

Lampiran

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

**BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI SUMBAR**

**TAHUN 2017**

1. PENDAHULUAN
2. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Mengingat pentingnya system pengendalian intern, selanjutnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian intern yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menyelenggarakan SPIP.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai bagian dari instasi penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Biro Organisasi secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 40 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sumatera Barat;

1. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di lingkup Biro Organisasi. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2017.

1. SEKILAS TENTANG SPIP
2. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengedalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

1. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

1. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengtahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu ”irama” organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

a. Penegakan integritas dan nilai etika;

b. Komitmen terhadap kompetensi;

c. Kepemimpinan yang kondusif;

d.Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;

h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

1. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat.

1. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

1. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyelenggarakan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

1. Pernyataan Tanggung Jawab *(Statement of Responsibilities)*

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

1. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN
2. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur‐unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai‐nilai etika;

2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;

3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;

4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan

6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

1. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat; Seluruh lingkup Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 1 Kepala Biro, 3 Kepala Bagian, 9 Kasubag dan 27 orang staf telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh sub bagian pada Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat.
2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 1:**

**Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Skor** | **Keterangan** |
| 1. | 1 | Tidak Memadai |
| 2. | 2 | Kurang Memadai |
| 3. | 3 | Cukup Memadai |
| 4. | 4 | Memadai |

1. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai pada Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat, diperoleh gambaran yang tertuang pada table di bawah ini:

**Tabel 2:Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Sub Unsur** | **Kondisi** |
| 1 | Penegakan Integritas Dan Nilai Etika | Kurang Memadai |
| 2 | Komitmen terhadap Kompetensi | Kurang Memadai |
| 3. | Kepemimpinan yang Kondusif | Cukup Memadai |
| 4. | Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan | Cukup Memadai |
| 5. | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat | Cukup Memadai |
| 6. | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia | Cukup Memadai |
| 7. | Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif | Cukup Memadai |
| 8. | Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait | Cukup Memadai |

1. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisen dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki terutama pada sub unsur integritas dan nilai etika serta komitmen terhadap kompetensi.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 : Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai (Sub Unsur)** | **Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian** |
|  |  |  |
| 1 | **PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA** | 1. Pembinaan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Biro Organisasi |
|  |  | 2. Kode Etik Kerja Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Biro Organisasi |
|  |  | 3. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik |
|  |  | 4. Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah |
| 2 | **KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI** | Penerapan dan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Biro Organisasi |
| 3 | **PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB** | Membuat Uraian Tugas mulai dari Kepala Biro Organisasi, para Kabag, Para Kasubag dan seluruh Staf Lingkup Biro Organisasi |
| 4 | **PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA** | Memberikan Prioritas Pengembangan Biro Organisasi Untuk Meningkatkan Kompetensi agar dapat meningkatkan Pelayanan Tugas Peraturan di Biro Organisasi Sesuai Tupoksi |
| 5 | **HUBUNGAN KERJA YAG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT** | Diwujudkan Melalui Monitoring dan Rapat - rapat Koordinasi bersama SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota |

1. **RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN**
2. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2017, rencana tindak pengendalian yang disusun Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas
2. Mengoptimalkan Penataan Kelembagaan
3. Mewujudkan Ketatalaksanaan yang Efektif dan Efisien dengan Prosedur Kerja yang terstandar dalam meningkatkan Pelayanan Prima
4. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Akurat dan Tepat Waktu
5. Mewujudkan SDM Aparatur yang berkompetensi dan Berkarier
6. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
7. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat.

Adapun resiko per kegiatan pada Biro Organisasi mencakup sebagai berikut:

1. Lambatnya Proses Mutasi Kepegawaian.
2. Data Tingkat disiplin lambat dan tidak valid.
3. Lebih terarahnya pengembangan karir PNS.
4. Lebih Terarahnya Pembinaan yang dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian.
5. Lebih terkoordinirnya pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh OPD yang merekrutnya.
6. Lebih cepatnya kepegawaian dikenal melalui ID Card.
7. Lebih diketahuinya tingkat kebutuhan PNS agar mereka dapat hidup layak.
8. Tipe Organisasi Perangkat daerah tidak sesuai dengan beban kerja yang sebenarnya.
9. Berpotensi terjadinya tumpang tindih/Overlap kewenangan antar perangkat daerah.
10. Lebih Terarahnya kegiatan dan program yang akan mendukung Reformasi Birokrasi.
11. Belum terlaksananya rtib penerapan prosedur dan tata kerja yang efektif dan efisien serta yang berstandarisasi.
12. Tidak berjalannya koordinasi dan komunikasi yang efektif dan baik dalam pelaksanaan pendayagunaan ASN.
13. Kurang primanya pelaksanaan pelayanan publik.
14. Kurang berkulias pelayanan publik UKPP
15. Kurang berkualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
16. Tidak terlaksananya penerapan SPM

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko ke-24 kegiatan pada Biro Organisasi sebagai berikut :

Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

1. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif. Adapun Pengendalian yang telah pada Biro Organisasi sebagai berikut :

1. Koordinasi secara intensif dengan instansi dan stakeholders terkait.
2. Monitoring/peninjauan lapangan ke Kab/Kota.
3. Rapat rapat koordinasi bersama OPD terkait baik lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan instasi terkait lainnya.
4. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Sebagaimana tujuan disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat yaitu mewujudkan Organisasi Pemerintah Daerah yang berkualitas, maka Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat juga masih membutuhkan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dimaksud agar berjalan efektif yaitu dengan tetap melakukan koordinasi secara intensif dengan Instansi dan stakeholders terkait baik lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Selanjutnya Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang terintegrasi dalam kegiatan organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko sebagaimana tertuang dalam lampiran 3.

1. **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Adapun Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

1. **PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA**

* Pembinaan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Biro Organisasi Pemutakhiran kode etik
* Kode Etik Kerja Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Biro Organisasi
* Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
* Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah

1. **KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI;**

* Penerapan dan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Biro Organisasi

1. **PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

* Membuat Uraian Tugas mulai dari Kepala Biro Organisasi, para Kabag, Para Kasubag dan seluruh Staf Lingkup Biro Organisasi

1. **PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

* Memberikan Prioritas Pengembangan Biro Organisasi Untuk Meningkatkan Kompetensi agar dapat meningkatkan Pelayanan Tugas Peraturan di Biro Organisasi Sesuai Tupoksi

1. **HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT**

* Diwujudkan Melalui Monitoring dan Rapat - rapat Koordinasi bersama SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota

1. **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing sub bagian pada Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh masing-masing kasubag terhadap terhadap kegiatan yang dimilikinya sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan risiko-risiko yang ada per kegiatan (24 kegiatan) pada Biro Organisasi yang meliputi sebagai berikut:

1. Pemantauan Berkelanjutan Tertib dan Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. (setiap bulan).
2. Pemantauan Terwujudnya Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov Sumbar (setiap bulan).
3. Pemantauan Untuk mengetahui jumlah data kepegawaian (setiap bulan)
4. Pemantauan Terlaksananya pengembangan karir PNS di Lingkungan Pemprov Sumbar (setiap bulan).
5. Pemantauan Terlaksana dan teribnya pelaksanaan rakornis Pembinaan aparatur daerah prov sumbar (setiap bulan).
6. Pemantauan Untuk mengetahui jumlah data tentang tenaga PPPK (setiap Bulan)
7. Pemantauan Terlaksananya monev perjanjian pemerintah dengan perjanjian kontrak (setiap bulan).
8. Pemantauan Terwujudnya peningkatan kesejahteraan Prov Sumbar (setiap bulan).
9. Pemantauan Terdapatnya dokumen pelaksanaan tugas biro yang disusun (setiap bulan).
10. Pemantauan Untuk mengetahui jumlah produk hukum daerah/Ranpegub UPT/CAPDIN Provins (setiap bulan).
11. Pemantauan Untuk mengetahui jumlah Pergub Rincian Tugas OPD Pemprov Sumbar (setiap bulan).
12. Pemantauan Untuk mengetahui Ranperda Kabupaten kota yang difasilitasi (setiap bulan).
13. Pemantauan Terlaksana dan tertibnya pelaksanaan Rakornis Kelembagaan Kab/Kota se Sumatera Barat (setiap bulan).
14. Pemantauan Untuk mengetahui kondisi kelembagaan perangkat daeah Kab/Kota (setiap bulan).
15. Pemantauan Tewujudnya peningkatan persentase pemahaman OPD dalam penyusunan Anjab (setiap bulan).
16. Pemantauan terdapatnya dokumen anjab (setiap bulan)
17. Terlaksananya sosialisasi Road Map RB (setiap bulan).
18. Untuk mengetahui jumlah SOP yang tersusun (setiap bulan).
19. Untuk mengetahui jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan (setiap bulan).
20. Terwujudnya peningkatan Pendayagunaan ASN (setiap bulan).
21. Untuk meningkatkan kualitas Unit Pelayanan publik (setiap bulan).
22. Untuk meningkatkan kualitas Unit Pelayanan publik (setiap bulan).
23. Untuk mengetahui nilai kualitas pelayanan pada unit pelayanan publik (setiap bulan).
24. Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan SDM (setiap bulan).

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang pada lampiran 5

1. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat selaku auditor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari seluruh kegiatan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

1. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendari hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tindak lanjutnya.

1. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan lapaoran atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat.

1. **PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian Intern Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

**Lampiran 1**

**Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai (Sub Unsur)** | **Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian** | **Penanggung Jawab Pelaksanaan perbaikan** | **Target Waktu Penyelesaian** |
|  |  |  |  |  |
| 1 | **PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA** | 1. Pembinaan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Biro Organisasi | Biro Organisasi | 12 Bulan |
|  |  | 2. Kode Etik Kerja Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Biro Organisasi | Biro Organisasi | 12 Bulan |
|  |  | 3. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik | Biro Organisasi | 12 Bulan |
|  |  | 4. Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah | Biro Organisasi | 12 Bulan |
| 2 | **KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI** | Penerapan dan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Biro Organisasi | Biro Organisasi | 12 Bulan |
| 3 | **PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB** | Membuat Uraian Tugas mulai dari Kepala Biro Organisasi, para Kabag, Para Kasubag dan seluruh Staf Lingkup Biro Organisasi | Biro Organisasi | 12 Bulan |
| 4 | **PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA** | Memberikan Prioritas Pengembangan Biro Organisasi Untuk Meningkatkan Kompetensi agar dapat meningkatkan Pelayanan Tugas Peraturan di Biro Organisasi Sesuai Tupoksi | Biro Organisasi | 12 Bulan |
| 5 | **HUBUNGAN KERJA YAG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT** | Diwujudkan Melalui Monitoring dan Rapat - rapat Koordinasi bersama SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota | Biro Organisasi | 12 Bulan |

**Lampiran 2**

**DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan yang diidentifikasi** | **Pernyataan Risiko** | **Pemilik Risiko** | **Penyebab** | **Dampak pada Capaian Tujuan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tertib dan Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. | Proses pengelolaan Administrasi Kepegawain di Lingkungan Setda Prov Sumbar lamban | Kabag Kinerja | Kurangnya SDM yang Mendukung Terlaksananya Pekerjaan | Hasil kerja tidak maksimal dan Kebijakan penyaluran BBM dan LPG Tabung 3 Kg tidak terlaksana secara optimal |
| 2 | Terwujudnya Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov Sumbar | PNS yang tidak disiplin akan memperlambat terwujudnya birokrasi profesional | Kabag Kinerja | Kurangnya Respon Atasan Langsung Untuk Menegur Bawahan saat melanggar disiplin |  |
| 3 | Untuk mengetahui jumlah data kepegawaian | Data kepegawaian ang tidak update mempengaruhi DUK dan anggaran | Kabag Kinerja | Kurangnya Respon |  |
| 4 | Terlaksananya pengembangan karir PNS di Lingkungan Pemprov Sumbar | Jika jenjang karir PNS tidak sesuai mengakibatkan pengembangan karir PNS tidak berdasarkan objektif dan transparan | Kabag Kinerja | Kurangnya Respon PNS untuk Menyampaikan Dokumen Kepegawaian ex: Penyampaian Sertifikat Diklat |  |
| 5 | Terlaksana dan teribnya pelaksanaan rakornis Pembinaan aparatur daerah prov sumbar | Aparatur yang tidak mematuhi budaya kerja sebagai pelayan masyarakat akan menghambat terwujudnya Reformasi Birokrasi | Kabag Kinerja |  |  |
| 6 | Untuk mengetahui jumlah data tentang tenaga PPPK | Apabila data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja idak tersedia maka sulit menganalisa penambahan atau pengurangan PPPK | Kabag Kinerja |  |  |
| 7 | Terlaksananya monev perjanjian pemerintah dengan perjanjian kontrak | Pelayanan masyarakat tanpa ID Card akan menghambat komunikasi dalam bertugas | Kabag Kinerja |  |  |
| 8 | Terwujudnya peningkatan kesejahteraan Prov Sumbar |  | Kabag Kinerja |  |  |
| 9 | Terdapatnya dokumen pelaksanaan tugas biro yang disusun |  | Kabag Kinerja |  |  |
| 10 | Untuk mengetahui jumlah produk hukum daerah/Ranpegub UPT/CAPDIN Provinsi | Apabila Perda Provinsi tidak sesuai dengan UU dan PP yang telah dietapkan, akan berakibat fatal terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Sumbar | Kabag Kelembagaan | Buku Yang Diberikan Oleh Perangkat Daerah saat Sharing Tipe Urusan Belum Sepenuhnya Valid | Tipe Urusan /Organisasi Perangkat Daerah tidak sesuai dengan beban kerja yang sebenarnya |
| 11 | Untuk mengetahui jumlah Pergub Rincian Tugas OPD Pemprov Sumbat | Apabila tupoksi OPD Provinsi tidak sesuai dengan UU dan PP yang telah ditetapkan, akan berakibat fatal terhadap kebijakan Pemerintah provinsi Sumbar | Kabag Kelembagaan | SOTK belum mengacu kepada Pedoman Nomenklatur yang dibebankan oleh kementrian Lembaga Teknis Terkait | Adanya Potensi Over Laping antar urusan di Perangkat daerah |
| 12 | Untuk mengetahui Ranperda Kabupaten kota yang difasilitasi | Apabila penataan dan penguatan Kelembagaan Kab/Kota tidak dilaksanakan,akan berakibat fatal terhadap kebijakan Pemerintah Kab/Kota | Kabag Kelembagaan |  |  |
| 13 | Terlaksana dan tertibnya pelaksanaan Rakornis Kelembagaan Kab/Kota se Sumatera Barat | Apabila Rakornis Kelembagaan Kab/Kota tidak dilakukan, akan berakibat disharmonisasi antara OPD Provinsi dan OPD Kab/Kota | Kabag Kelembagaan |  |  |
| 14 | Untuk mengetahui kondisi kelembagaan perangkat daeah Kab/Kota | Apabila monitoring dan evaluasi perangkat daerah idak dilakukan akan berakibat disharmonisasi antara OPD provinsi dan OPD kab/Kota | Kabag Kelembagaan |  |  |
| 15 | Tewujudnya peningkatan persentase pemahaman OPD dalam penyusunan Anjab |  | Kabag Kelembagaan |  |  |
| 16 | terdapatnya dokumen anjab | Apabila Anjab ABK dan Evjab tidak diimplementasikan , penataan kepegawaian Pemda Prov Sumbar tidak akan berjalan optimal | Kabag Kelembagaan |  |  |
| 17 | Terlaksananya sosialisasi Road Map RB | Pimpinan OPD belum memahami reformasi birokrasi maka tujuan pemerintah unuk mewujudkan birokrasi profesional sulit terwujud | Kabag Kinerja |  |  |
| 18 | Untuk mengetahui jumlah SOP yang tersusun | Apabila Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan akan berakibat penyimpangan dari aturan pelaksanaan suatu pekerjaan | Kabag Ketatalaksanaan | Masih Kurangnya Pengetahuan Aparatur Bahwa SOP merupakan Pedoman Kerja Untuk Melaksanakan Tupoksi dan Kegiatan Sehari-hari |  |
| 23 | Untuk mengetahui jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan | Dalam proses penyelenggaraan Ketatalaksanaan masih sering terjadi prakik umpang tindih kewenangan atau fungsi pemerintahan, benturan atau belum harmonisnya tata hubungan kerja antar satuan kerja/instansi yang akan mengakibatkan tidak terlaksannya penguatan ketatalaksanaan Provinsi Kab/Kota | Kabag Ketatalaksanaan | Masih Kurangnya Pemahaman Aparatur apa yang menjadi Tupoksi | Pelayan Tidak Sesuai dengan Harapan Masyarakat |
| 19 | Terwujudnya peningkatan Pendayagunaan ASN | jika Terjadi perbedaan,cara pandang dan implementasi suatu program kegiatan yang diamanatkan oleh aturan kepada Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota maka pendayangunaan ASN tidak akan meningkat | Kabag Kinerja |  |  |
| 20 | Untuk meningkatkan kualitas Unit Pelayanan publik | Rendahnya motivasi dan inovasi OPD/UKPP dalam penyelenggaraan pelayanan publik ynang diselenggarakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pelayanan publik | Kabag Ketatalaksanaan | Masih Kurangnyya Mental Aparatur Pelayanan Tentang Fungsinya Sebagai Pelayan Masyarakat |  |
| 21 | Untuk meningkatkan kualitas Unit Pelayanan publik | Apabila Kinerja Pelayanan publik pada UKPP Provinsi dan Kabupaten/Kota menurun, maka ini menimbulkan resiko yang menimbulkan ketidakpuasan masyaraka/publik | Kabag Ketatalaksanaan |  |  |
| 22 | Untuk meningkatkan kualitas Unit Pelayanan publik | Apabila jika penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan publik tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,berakibat menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat/publik, yang menjadi subjek pelayanan publik. Hal ini jika dipantau oleh Ombudsman RI maka dianggap memberikan pelayanan di bawah Standar Pelayanan dan diberikan nilai kepatuhan pada zonasi kuning atau merah | Kabag Ketatalaksanaan | Masih Kurangnya Pelatihan Bagi Aparatur Pelayanan | SDA |
| 23 | Untuk mengetahui nilai kualitas pelayanan pada unit pelayanan publik | Apabila OPD dan UKPP sebagai Penyelenggara dan pelaksana tidak memiliki data tentang kepuasan masyarakat atas layanan publiknya,maka UKPP tidak memiliki "sense" apabila ternyata masyarakat ada yang kurang puas atas pelayanan yang diberikan | Kabag Ketatalaksanaan | Masih Jarangnya dilakukan Survey Kepuasan Masyrakat | SDA |
| 24 | Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan SPM | Tidak terukurnya kualitas dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemrintah provinsi ,Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat akan mengakibatkan tidak terkoordinasinya penerapan standar pelayanan minimal | Kabag Ketatalaksanaan | Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Penunjang Pelayanan Publik | Pelayan Dasar Tidak Tercapai |
|  |  |  |  |  |  |

**LAMPIRAN 3**

**RENCANA TINDAKAN PENGENDALIAN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pernyataan Risiko** | **Pengendalian yang masih dibutuhkan** | **Penanggung Jawab** | **Waktu Pelaksanaan** |
| 1 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Proses pengelolaan Administrasi Kepegawain di Lingkungan Setda Prov Sumbar lamban | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Kinerja | Bulanan |
| 2 | PNS yang tidak disiplin akan memperlambat terwujudnya birokrasi profesional | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Kinerja | Bulanan |
| 3 | Data kepegawaian ang tidak update mempengaruhi DUK dan anggaran | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Kinerja | Bulanan |
| 4 | Jika jenjang karir PNS tidak sesuai mengakibatkan pengembangan karir PNS tidak berdasarkan objektif dan transparan | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Kinerja | Bulanan |
| 5 | Aparatur yang tidak mematuhi budaya kerja sebagai pelayan masyarakat akan menghambat terwujudnya Reformasi Birokrasi | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Kinerja | Bulanan |
| 6 | Apabila data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja idak tersedia maka sulit menganalisa penambahan atau pengurangan PPPK | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Kinerja | Bulanan |
| 7 | Pelayanan masyarakat tanpa ID Card menghambat komunikasi dalam bertugas | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Kinerja | Bulanan |
| 8 |  | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Kinerja | Bulanan |
|  |  |  |  |  |
| 9 |  | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Kinerja | Bulanan |
|  |  |  |  |  |
| 10 | Apabila Perda Provinsi tidak sesuai dengan UU dan PP yang telah dietapkan, akan berakibat fatal terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Sumbar | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Kelembagaan | Bulanan |
| 11 | Apabila tupoksi OPD Provinsi tidak sesuai dengan UU dan PP yang telah ditetapkan, akan berakibat fatal terhadap kebijakan Pemerintah provinsi Sumbar | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Kelembagaan | Bulanan |
| 12 | Apabila penataan dan penguatan Kelembagaan Kab/Kota tidak dilaksanakan,akan berakibat fatal terhadap kebijakan Pemerintah Kab/Kota | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Kelembagaan | Bulanan |
| 13 | Apabila Rakornis Kelembagaan Kab/Kota tidak dilakukan, akan berakibat disharmonisasi antara OPD Provinsi dan OPD Kab/Kota | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Kelembagaan | Bulanan |
| 14 | Apabila monitoring dan evaluasi perangkat daerah tidak dilakukan akan berakibat disharmonisasi antara OPD provinsi dan OPD kab/Kota | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Kelembagaan | Bulanan |
| 15 |  | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Kelembagaan | Bulanan |
| 16 | Apabila Anjab ABK dan Evjab tidak diimplementasikan , penataan kepegawaian Pemda Prov Sumbar tidak akan berjalan optimal | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Kelembagaan | Bulanan |
|  |  |  |  |  |
| 17 | Pimpinan OPD belum memahami reformasi birokrasi maka tujuan pemerintah unuk mewujudkan birokrasi profesional sulit terwujud | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Kinerja | Bulanan |
|  |  |  |  | Bulanan |
| 18 | Apabila Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan akan berakibat penyimpangan dari aturan pelaksanaan suatu pekerjaan | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Ketatalaksanaan | Bulanan |
| 19 | Dalam proses penyelenggaraan Ketatalaksanaan masih sering terjadi prakik umpang tindih kewenangan atau fungsi pemerintahan, benturan atau belum harmonisnya tata hubungan kerja antar satuan kerja/instansi yang akan mengakibatkan tidak terlaksannya penguatan ketatalaksanaan Provinsi Kab/Kota | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Ketatalaksanaan | Bulanan |
| 20 | jika Terjadi perbedaan,cara pandang dan implementasi suatu program kegiatan yang diamanatkan oleh aturan kepada Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota maka pendayangunaan ASN tidak akan meningkat | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Ketatalaksanaan | Bulanan |
| 21 | Rendahnya motivasi dan inovasi OPD/UKPP dalam penyelenggaraan pelayanan publik ynang diselenggarakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pelayanan publik | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Ketatalaksanaan | Bulanan |
|  |  |  |  |  |
| 22 | Apabila Kinerja Pelayanan publik pada UKPP Provinsi dan Kabupaten/Kota menurun, maka ini menimbulkan resiko yang menimbulkan ketidakpuasan masyaraka/publik | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Ketatalaksanaan | Bulanan |
| 23 | Apabila jika penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan publik tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,berakibat menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat/publik, yang menjadi subjek pelayanan publik. Hal ini jika dipantau oleh Ombudsman RI maka dianggap memberikan pelayanan di bawah Standar Pelayanan dan diberikan nilai kepatuhan pada zonasi kuning atau merah | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Ketatalaksanaan | Bulanan |
| 24 | Apabila OPD dan UKPP sebagai Penyelenggara dan pelaksana tidak memiliki data tentang kepuasan masyarakat atas layanan publiknya,maka UKPP tidak memiliki "sense" apabila ternyata masyarakat ada yang kurang puas atas pelayanan yang diberikan | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Ketatalaksanaan | Bulanan |
| 25 | Tidak terukurnya kualitas dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemrintah provinsi ,Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat akan mengakibatkan tidak erkoordinasinya penerapan standar pelayanan minimal | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Kabag Ketatalaksanaan | Bulanan |

Lampiran 4

**Rencana Informasi Dan Komunikasi Pengendalian**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan yang Diidentifikasi** | **Pengendalian Yg Direncanakan** | **Bentuk/ Sarana Komunikasi** | **Penyedia Informasi** | **Penerima Informasi** | **Waktu Pelaksanaan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Tertib dan Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
| 2 | Terwujudnya Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov Sumbar | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
| 3 | Untuk mengetahui jumlah data kepegawaian | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
| 4 | Terlaksananya pengembangan karir PNS di Lingkungan Pemprov Sumbar | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
| 5 | Terlaksana dan teribnya pelaksanaan rakornis Pembinaan aparatur daerah prov sumbar | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
| 6 | Untuk mengetahui jumlah data tentang tenaga PPPK | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
| 7 | Terlaksananya monev perjanjian pemerintah dengan perjanjian kontrak | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
| 8 | Terwujudnya peningkatan kesejahteraan Prov Sumbar | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Terdapatnya dokumen pelaksanaan tugas biro yang disusun | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Untuk mengetahui jumlah produk hukum daerah/Ranpegub UPT/CAPDIN Provinsi | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
| 11 | Untuk mengetahui jumlah Pergub Rincian Tugas OPD Pemprov Sumbar | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
| 12 | Untuk mengetahui Ranperda Kabupaten kota yang difasilitasi | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
| 13 | Terlaksana dan tertibnya pelaksanaan Rakornis Kelembagaan Kab/Kota se Sumatera Barat | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
| 14 | Untuk mengetahui kondisi kelembagaan perangkat daeah Kab/Kota | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
| 15 | Tewujudnya peningkatan persentase pemahaman OPD dalam penyusunan Anjab | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
| 16 | terdapatnya dokumen anjab | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Terlaksananya sosialisasi Road Map RB | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Untuk mengetahui jumlah SOP yang tersusun | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
| 19 | Untuk mengetahui jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
| 20 | Terwujudnya peningkatan Pendayagunaan ASN | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
| 21 | Untuk meningkatkan kualitas Unit Pelayanan publik | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Untuk meningkatkan kualitas Unit Pelayanan publik | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
| 23 | Untuk meningkatkan kualitas Unit Pelayanan publik | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
| 24 | Untuk mengetahui nilai kualitas pelayanan pada unit pelayanan publik | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |
| 25 | Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan SDM | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA | Biro Organisasi | OPD terkait | Bulanan |

**Lampiran 5**

**Rancangan Pemantauan Berkelanjutan Atas Pengendalian**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan yang Diidentifikasi** | **Uraian Pengendalian** | **Metode Pemantauan yang ada** | **Pemantauan yang akan digunakan** | |
| **Metode Pemantauan** | **Dilakukan Oleh** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tertib dan Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
| 2 | Terwujudnya Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov Sumbar | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
| 3 | Untuk mengetahui jumlah data kepegawaian | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
| 4 | Terlaksananya pengembangan karir PNS di Lingkungan Pemprov Sumbar | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
| 5 | Terlaksana dan teribnya pelaksanaan rakornis Pembinaan aparatur daerah prov sumbar | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
| 6 | Untuk mengetahui jumlah data tentang tenaga PPPK | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
| 7 | Terlaksananya monev perjanjian pemerintah dengan perjanjian kontrak | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
| 8 | Terwujudnya peningkatan kesejahteraan Prov Sumbar | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
|  |  |  |  |  |  |
| 9 | Terdapatnya dokumen pelaksanaan tugas biro yang disusun | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
|  |  |  |  |  |  |
| 10 | Untuk mengetahui jumlah produk hukum daerah/Ranpegub UPT/CAPDIN Provinsi | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
| 11 | Untuk mengetahui jumlah Pergub Rincian Tugas OPD Pemprov Sumbar | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
| 12 | Untuk mengetahui Ranperda Kabupaten kota yang difasilitasi | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
| 13 | Terlaksana dan tertibnya pelaksanaan Rakornis Kelembagaan Kab/Kota se Sumatera Barat | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
| 14 | Untuk mengetahui kondisi kelembagaan perangkat daeah Kab/Kota | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
| 15 | Tewujudnya peningkatan persentase pemahaman OPD dalam penyusunan Anjab | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
| 16 | terdapatnya dokumen anjab | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
|  |  |  |  |  |  |
| 17 | Terlaksananya sosialisasi Road Map RB | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
|  |  |  |  |  |  |
| 18 | Untuk mengetahui jumlah SOP yang tersusun | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
| 19 | Untuk mengetahui jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
| 20 | Terwujudnya peningkatan Pendayagunaan ASN | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
| 21 | Untuk meningkatkan kualitas Unit Pelayanan publik | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
|  |  |  |  |  |  |
| 22 | Untuk meningkatkan kualitas Unit Pelayanan publik | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
| 23 | Untuk meningkatkan kualitas Unit Pelayanan publik | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
| 24 | Untuk mengetahui nilai kualitas pelayanan pada unit pelayanan publik | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |
| 25 | Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan SDM | Koord.secara intensif dgn instansi dan stakeholders terkait | sudah ada | Pemantauan berkelanjutan | Atasan Langsung |

Mengetahui

Kepala Biro Organisasi

IRWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19680415 198902 1 001